INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2014).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2015).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan jumlah bangunan rumah.

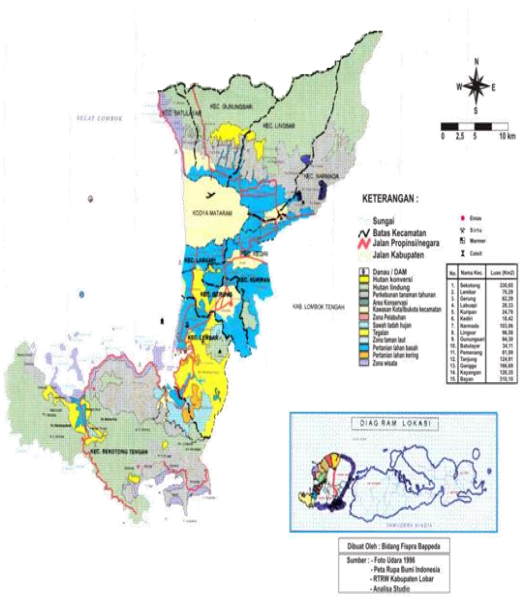

Secara geografis Kabupaten Lombok Barat terletak di antara 115^{0}46' sampai dengan 116^{0}28 Bujur Timur dan 8^{0}12' sampai dengan 8^{0}55' Lintang Selatan.

Kabupaten Lombok Barat termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 27,6 ^{0}C dan suhu maksimum berkisar 32,6 ^{0}C serta suhu minimum 22,6 ^{0}C, dengan tingkat curah hujan rata-rata 77,38 mm setiap bulannya.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lombok Barat meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah Dan Lombok Timur
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai berikut :

a. ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 34.800 Ha atau 40,80% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.
b. ketinggian 100-500 meter, memiliki luas wilayah sebesar 40.966 Ha atau 48% dari 2. luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.
c. ketinggian 500-1000 meter memiliki luas wilayah 8.650 Ha atau 10,1% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan
d. ketinggian 1000 meter keatas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan sebagai berikut:

a. Tingkat kemiringan 0-2 % merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat;
b. Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
c. Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat ; dan
d. Tingkat kemiringan lahan 40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8% dari luas Kabupaten Lombok Barat dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Kabupaten Lombok Barat memiliki posisi yang strategis, yaitu sebagai pintu gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Provinsi Bali dengan adanya Pelabuhan Lembar, dan merupakan daerah perlintasan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah dengan pusat pemerintahan Provinsi NTB yang terletak di Kota Mataram. Selain itu, Pulau Lombok yang telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata baru oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah pulau bali, menjadikan peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kabupaten Lombok Barat juga ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata terbaik (destinasi wisata) setelah pulau Bali sehingga angka kunjungan wisata dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Kota Mataram, di Kabupaten Lombok Barat telah berkembang pesat perumahan dan pemukiman penduduk.

Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat tercatat terdapat sejumlah 149.593 unit bangunan rumah. Jumlah bangunan rumah paling banyak berada di Kecamatan Narmada sebanyak 23.206 unit atau 15,51%. Dan jumlah bangunan paling sedikit di Kecamatan Batulayar sebanyak 8.863 unit atau 5,92%. Secara rinci, jumlah bangunan rumah per Kecamatan sebagai berikut ;

NO	KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN RUMAH	PERSENTASE (%)
1	Gunungsari	22.934	15,33
2	Batulayar	8.863	5,92
3	Narmada	23.206	15,51
4	Lingsar	13.747	9,19
5	Kediri	13.687	9,15
6	Kuripan	9.837	6,58
7	Labuapi	14.461	9,67
8	Gerung	17.102	11,43
9	Lembar	13.378	8,94
10	Sekotong Tengah	12.378	8,27
	Jumlah	**149.593**	**100,00**

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan, 119 Desa, 3 Kelurahan dan 820 Dusun serta 19 Lingkungan. Dimana Kecamatan Sekotong Tengah memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah sekitar 529,38 Km^2 atau sekitar 50,23% terkecil Kecamatan Kuripan dengan luas wilayah 21.56 Km^2 atau 2,05% dari total luas daratan di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut;

NO	KECAMATAN	JUMLAH DUSUN DAN LINGKUNGAN	LUAS WILAYAH (KM^2)	PERSEN TASE LUAS (%)
1	Gunungsari	102	89,74	8,51
2	Batulayar	63	34,11	3,24
3	Narmada	129	107,62	10,21
4	Lingsar	93	96,58	9,16
5	Kediri	74	21,64	2,05
6	Kuripan	40	21,56	2,05
7	Labuapi	73	28,33	2,69
8	Gerung	89	62,30	5,91
9	Lembar	81	62,66	5,95
10	Sekotong Tengah	95	529,38	50,23
Jumlah		**839**	**1.053,92**	**100,00**

Sumber : BPMPD Kabupaten Lombok Barat

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat menurut jenis kelamin terdiri dari 357.932 orang laki-laki atau sekitar 50,50 % dan terdiri dari 350.949 orang atau sekitar 49,50 % menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Lombok Barat lebih dominan penduduk berjenis kelamin Laki-laki dibanding dengan penduduk perempuan, sesuai dengan tabel sebagai berikut ;

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Gerung	50.080	49.946	100.026
2	Kediri	34.918	34.634	69.552
3	Narmada	46.988	45.858	92.846
4	Sekotong Tengah	36.064	33.815	69.879
5	Labuapi	35.250	35.006	70.256
6	Gunungsari	42.161	41.629	83.790
7	Lingsar	36.357	35.418	71.775
8	Lembar	29.135	28.404	57.539
9	Batulayar	27.338	26.942	54.280
10	Kuripan	19.641	19.297	38.938
	JUMLAH	**357.932**	**350.949**	**708.881**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Menurut kelompok umur, pada tahun yang sama memperlihatkan bahwa kelompok umur terbesar adalah usia antara 15-64 tahun atau kategori usia produktif sebanyak 498.088 jiwa atau sebesar 70,26% menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat mempunyai potensi yang besar dibidang Sumber Daya Manusia yang produktif untuk mendukung pembangunan berbagai sektor . Jumlah kelompok umur terkecil adalah usia >75 tahun sebanyak 4.909 jiwa atau 0,69%. Untuk lebih jelasnya data komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat sebagai berikut ;

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN TASE (%)
1	0-4	27.096	25.168	52.264	7,37
2	5-9	31.624	29.796	61.420	8,66
3	10-14	38.031	36.234	74.265	10,48
4	15-19	28.947	28.006	56.953	8,03
5	20-24	33.924	33.606	67.530	9,53
6	25-29	35.367	36.890	72.257	10,19

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN TASE (%)
7	30-34	33.568	35.694	69.262	9,77
8	35-39	30.651	32.865	63.516	8,96
9	40-44	26.784	25.792	52.576	7,42
10	45-49	21.863	21.697	43.560	6,14
11	50-54	16.616	15.336	31.952	4,51
12	55-59	12.505	11.634	24.139	3,41
13	60-64	8.750	7.593	16.343	2,31
14	65-69	5.891	5.394	11.285	1,59
15	70-74	3.682	2.968	6.650	0,94
16	> 75	2.633	2.276	4.909	0,69
JUMLAH		**357.932**	**350.949**	**708.881**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Selanjutnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN TASE (%)
1	Tidak / Belum Sekolah	106.957	116.858	223.815	31,57
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	39.746	40.249	79.995	11,28
3	Tamat SD / Sederajat	97.945	100.800	198.745	28,04
4	SLTP / Sederajat	44.253	41.521	85.774	12,10
5	SLTA / Sederajat	55.877	40.946	96.823	13,66
6	Diploma I / II	1.670	1.543	3.213	0,45
7	Akademi / Diploma III	1.895	2.114	4.009	0,57
8	Diploma IV / Strata I	8.853	6.658	15.511	2,19
9	Strata II	673	236	909	0,13
10	Strata III	63	24	87	0,01
JUMLAH		**357.932**	**350.949**	**708.881**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk terbesar adalah belum sekolah sebanyak 31,57% disusul tamat SD/sederajat sebesar 28,04%, sedang terkecil pada jenjang pendidikan S3 sebanyak 0,01% menjadi tantangan terbesar bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan segenap masyarakat di Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

Persentase jumlah Penduduk menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ;

BIDANG PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RATA-RATA
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	26,09	29,45	27,45
Pertambangan dan Penggalian	5,37	3,35	4,55
Industri	8,52	16,74	11,85
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,27	0,27	0,27
Konstruksi	18,10	0,84	11,10
Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,98	33,67	23,75
Transportasi	6,61	0,75	4,23
Keuangan	0,71	0,57	0,65
Jasa-jasa	16,88	14,23	15,81
Lain-lain	0,46	0,13	0,33
JUMLAH	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Lombok Barat Dalam Angka

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mampu menyerap tenaga kerja terbanyak dengan 27,45 persen disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,75 persen serta jasa-jasa dengan 15,81 persen. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah industri dan konstruksi masing-masing sebesar 11,85 persen dan 11,10 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,55 persen, sektor transportasi 4,23 persen disusul oleh sektor keuangan sebesar 0,65 persen, sektor lain-lain sebesar 0,33 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,27 persen.

Selanjutnya jumlah penduduk menurut rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut ;

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	PERSENTASE (%)
1	Gerung	32.899	14,90
2	Kediri	19.902	9,02
3	Narmada	29.904	13,55
4	Sekotong Tengah	22.171	10,04

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	PERSENTASE (%)
5	Labuapi	20.923	9,48
6	Gunungsari	25.978	11,77
7	Lingsar	22.486	10,19
8	Lembar	18.735	8,49
9	Batulayar	15.544	7,04
10	Kuripan	12.215	5,53
JUMLAH		**220.757**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Gerung sebanyak 32.899 kepala keluarga atau 14,90% disusul Kecamatan Narmada sebanyak 29.904 kepala keluraga atau 13,55% dan Kecamatan Gunungsari sebanyak 25.978 kepala keluarga atau 11,77%, sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Kuripan sebanyak 12.215 (5,53%). Jika dibanding data jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarga maka rata-rata satu rumah tangga terdiri dari 3,21 jiwa.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Posisi geografis Kabupaten Lombok Barat yang terletak diantara pulau Bali dan Pulau Komodo yang merupakan daerah tujuan pariwisata di Indonesia merupakan peluang yang strategis bagi pengembangan investasi kepariwisataan, dengan ditunjang oleh prasarana dan sarana kepariwisataan yang memadai.

Dengan prasarana dan sarana yang memadai itu pula, Kabupaten Lombok Barat sering ditunjuk untuk menyelenggarakan even-even kegiatan nasional maupun internasional yang memberikan peluang dalam pembangunan daerah dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

Selain hal tersebut diatas dengan luas wilayah 1.053,92 Km^2 Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bervariatif untuk dikembangkan, mulai dari Pariwisata, Pertanian, Industri Kerajinan, Agro Industri, Agro Wisata,

Perdagangan, Perikanan, Kehutanan, dan Pertambangan. Beberapa potensi unggulan yang potensial untuk dikembangkan di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai berikut :

NO.	JENIS KLASTER INDUSTRI	KLASTER WILAYAH
1	Pariwisata, Industri Kerajinan, Pertanian	Batulayar, Gunungsari
2	Agroindustri, Agrowisata, Pariwisata, Pertanian	Narmada, Lingsar
3	Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Pertanian	Gerung
4	Pariwisata, Perikanan,Pertanian Pertambangan	Sekotong Tengah
5	Perikanan, Perdagangan dan Jasa	Lembar
6	Pendidikan, Pertanian, Industri Kerajinan	Kediri, Labuapi, Kuripan

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan kajian ekonomi seperti nampak pada tabel di atas, klaster usaha Pertanian menempati unggulan pertama diikuti Industri Pariwisata, Jasa-jasa, Pengangkutan dan Komunikasi dan Pertambangan.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sesuai dengan yang ditargetkan.

PDRB Kabupaten Lombok Barat dihitung atas dasar harga (Adh) berlaku mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 10,136 trilyun rupiah atau 45,25 % dari tahun 2013 mencapai Rp. 5,549 trilyun rupiah menjadi 10,136 trilyun rupiah pada tahun 2014, sedangkan perhitungan Adh konstan mencapai Rp. 8,687 triliun rupiah, seperti tertera dalam tabel berikut ;

NO	LAPANGAN USAHA	HARGA BERLAKU (000.000)**	PERSEN TASE (%)**
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2.065.020,42	20,37
2	Pertambangan dan Penggalian	716.816,51	7,07
3	Industri Pengolahan	456.189,06	4,50
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.991,63	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.642,35	0,12
6	Konstruksi	1.246.105,21	12,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.301.392,29	12,84
8	Transportasi dan Pergudangan	970594,94	9,58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	860.648,95	8,49
10	Informasi dan Komunikasi	212.154,21	2,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	285.099,30	2,81
12	Real Estat	353.094,73	3,48
13	Jasa Perusahaan	10.980,05	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	714.060,02	7,04
15	Jasa Pendidikan	502.916,91	4,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	190.902,59	1,88
17	Jasa lainnya	230.623,66	2,28
	TOTAL PDRB	**10.136.232,83**	**100**

***) Angka Sangat Sementara*
Sumber: Buku PDRB Kabupaten Lombok Barat

Sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 20,37 persen terhadap PDRB menjadi *leading sector* perekonomian Kabupaten Lombok Barat .Dan diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang memberikan kontribusi sebesar 12,84 persen serta sektor konstruksi dengan kontribusi 12,29 persen. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata), masing-masing sebesar 9,58 persen dan 8,49 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi terkecil berturut-turut adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,88 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,12 persen disusul oleh sektor jasa perusahaan sebesar 0,11 persen, serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,07 persen.

NO	LAPANGAN USAHA	HARGA KONSTAN (000.000)**	PERSENTASE (%)**
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.854.151,46	21,34
2	Pertambangan dan Penggalian	590.668,52	6,80
3	Industri Pengolahan	445.765,45	5,13
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	8.878,59	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.947,63	0,11
6	Konstruksi	1.170.633,82	13,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.107.297,02	12,75
8	Transportasi dan Pergudangan	843.576,58	9,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	579.019,09	6,66
10	Informasi dan Komunikasi	210.048,76	2,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	236.260,57	2,72
12	Real Estat	279.040,94	3,21
13	Jasa Perusahaan	9.371,42	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	529.971,33	6,10
15	Jasa Pendidikan	419.533,20	4,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.314,36	2,01
17	Jasa lainnya	219.216,75	2,52
	TOTAL PDRB	**8.687.695,49**	**100,00**

*** Angka Sangat Sementara*
Sumber: Buku PDRB Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 sesuai tabel diatas, sektor pertanian masih mendominasi lapangan usaha penduduk Kabupaten Lombok Barat dengan kontribusi sebesar 21,34 persen disusul sektor konstruksi sebesar 13,47 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010 dimana perhitungan tersebut menggambarkan pertumbuhan riil atau pertumbuhan ekonomi, di Kabupaten Lombok Barat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,45 % per tahun.

c. Laju Inflasi

Tingginya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada melonjaknya tingkat inflasi di Kabupaten Lombok Barat, laju inflasi/ perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) di Kota Mataram yang

merupakan kota terdekat dengan Kabupaten Lombok Barat sebesar 7,18 % dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Lombok Barat sebesar 12,80 % . Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Lombok Barat selama periode tersebut mengalami kenaikan, sehingga dapat dikatakan pendapatan riil penduduk di Kabupaten Lombok Barat mengalami kenaikan pula.

NO.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014 **)
1.	**Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku**	**8,25**	**9,32**	**8,62**	**7,93**	**12,80**
2.	**Pertumbuhan PDRB Harga Konstan**	**4,92**	**6,05**	**5,27**	**5,25**	**5,45**
3.	**Laju Inflasi**	**11,07**	**6,38**	**4,10**	**9,27**	**7,18**

*** Angka Sangat Sementara*
Sumber: Buku PDRB Kab. Lombok Barat

II. VISI DAN MISI

Visi : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU**"

Misi :

1. Misi Pertama

Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

2. Misi Kedua

Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. **Misi Ketiga**

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

4. **Misi Keempat**

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. **Misi Kelima**

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

6. **Misi ke Enam**

Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum

A. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan rumusan langkah – langkah strategis dengan mengoptimalkan potensi daerah dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan internal dan tantangan eksternal pembangunan daerah untuk menjamin terlaksananya misi dan tercapainya visi pembangunan daerah. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran – sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati issu – issu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Barat 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
MISI I : Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Dan Kemandirian Daerah Untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif Dan Produktif)			
1. Meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah	Tersedianya rencana pembangunan infrastruktur yang terarah dan terpadu	Koordinasi, Konsultasi Fasilitasi, Regulasi dan Sosilaisasi	Pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif
	Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi,Regulasi, Implementasi dan Evaluasi	Pengembangan dan pemantapan pengelolaan kawasan startegis perkotaaan
	Tersedia sarana dan prasarana wilayah yang seimbang	Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi, Kontruksi dan Rehabilitasi	Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Swasta
		Koordinasi, Regulasi dan Fasilitasi	Peningkatan kemanan dan kenyamanan perhubungan
2. Meningkatkan produktivitas produk sumberdaya alam daerah	Terwujudnya produk sumber daya alam yang berkualitas dan memenuhi standar pasar.	Intensifikasi dan diversifikasi	Pengembangan produksi durian, aren, kemiri dan madu serta Peningkatan produksi sektor perikanan
3. Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi	Terwujudnya sistem pelayanan investasi yang memadai	Koordinasi, Regulasi dan Promosi	Pengembangan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi elektronik
4. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah	Koordinasi dan Fasilitasi	Peningkatan sumber-sumber PAD yang potensial
5. Meningkatkan kondusivitas daerah	Terwujudnya Kondusifitas daerah	Sosialisasi, Edukasi dan Fasilitasi	Peningkatan Penegakan Hukum
MISI II : Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)			
1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Koordinasi, regulasi, sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih	Terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Koordinasi, regulasi, sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi	
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Koordinasi, regulasi, sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi	
MISI III :	**Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial Dan Budaya Yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar tangguh Dan Berbudaya)**		
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabiltas masyarakat.	Terwujudnya peran serta pemuda yang berprestasi	Fasilitasi, edukasi	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga
	Terwujudnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Sosialisasi dan edukasi	Pengembangan kapasitas sosial dan ekonomi perempuan
2. Meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya pusat kebudayaan yang representatif	Koordinasi, Revitalisasi dan promosi	Pelestarian pusat kebudayaan daerah
	Terwujudnya budayawan/seniman yang kreatif dan inovatif	Fasilitasi, eduksi dan promosi	Pengembangan event budaya lokal
	Terlindunginya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal	Koordinasi, Edukasi dan Revitalisasi	Pendaftaran Hak kepemilikan Kekayaan seni budaya dan kearifan lokal
3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang taat beragama	Fasilitasi, Edukasi dan Revitalisasi	Penyediaan Pembangunan tempat ibadah
MISI IV :	**Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian Dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)**		
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya alam	Terwujudnya pelestarian sumber mata air	Koordinasi, Fasilitasi , sosialisasi dan Regulasi	Perlindungan dan pelestarian sumber-sumber mata air
	Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan	Koordinasi, Fasilitasi , sosialisasi dan edukasi	Peningkatan PHBS masyarakat dan Penertiban PETI
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya mineral dan energi	Tersedianya sumber energi baru dan terbaharu	Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi, Edukasi dan Kontruksi	Penyediaan dan pengembangan sumber energi baru dan terbaharukan
3. Meningkatkan produktivitas dan kontinuitas pangan daerah	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Intensivikasi dan diversifikasi	Peningkatan kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		Revitalisasi dan fasilitasi	Peningkatan produksi pertanian
4. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan bencana	Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap bencana	Identifikasi, sosialisasi, fasilitasi dan mobilisasi	Pengembangan desa model siaga bencana
	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana	Koordinasi dan fasilitasi	Penambahan armada Damkar
MISI V :	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional,Nasional Dan Global (Lobar Sehat Dan Cerdas)**		
1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan sosial dasar	Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing	Koordinasi, sikronisasi, edukasi, fasilitasi, dan mobilisasi	Pengembangan kesadaran dan perilaku hidup masyarakat yang sehat dan cerdas
2. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penanganan masalah sosial	Tersedianya layanan sosil dasar	Fasilitasi dan Revitalisasi	Pengembangan pelayanan sosial dan kesempatan kerja
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar	Terwujudnya sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang memadai	Revitalisasi dan fasilitasi	Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sarana pelayanan sosial dasar
MISI VI :	**Meningkatkan martabat dan kebanggaan daerah (Lobar Bermartabat)**		
1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera	Koordinasi dan fasilitasi	Peningkatan koordinasi penanggulangan Kemiskinan daerah
2. Meningkatkan kualitas kesejahteraan umum	Terwujudnya pemerataan ekonomi	Koordinasi dan Fasilitasi	Pengembangan pembangunan yang berkeadilan dan proporsional

Sumber : RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2010-2014

B. Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya

meliputi program-program unggulan dari SKPD yang paling tinggi relasinya bagai tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Mengingat pada tahun 2015 implementasi RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 telah berakhir maka perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025. Program prioritas tidak semua menjadi prioritas pembangunan daerah sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal.

Dalam menyeimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, maka harus ditentukan prioritas pembangunan daerah Tahun 2015 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2012 dan 2013, disamping itu juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya.

Program prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

Dengan memperhatikan skala prioritas pembangununan dalam RPJP pada RPJMD ke-3 (2015-2019) dan Tema RKPD 2015, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan 2015, yaitu :

1. *Bidang Pendidikan* yaitu dengan meningkatkan aksesbilitas dan kualitas bagi seluruh kelompok masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai :
   a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
   b. Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM).
   c. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
   d. Optimalisasi penerapan kurikulum baru Tahun 2013.
   e. Peningkatan mutu lulusan peserta didik.
   f. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
   g. Pengentasan tuna aksara.
   h. Meningkatkan angka indeks pendidikan.
   i. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin pada peningkatan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan Angka Partisipasi Kasar dan peningkatan Angka Partisipasi Murni.

2. *Bidang Kesehatan* yaitu dengan meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan, dengan sasaran yang ingin dicapai :
   a. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan umum yang baku (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum) secara merata di seluruh wilayah.
   b. Mengalokasikan dana yang memadai bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan murah.
   c. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.
   d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
   e. Menjaga ketersediaan obat dan pengawasan dalam upaya pencagahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.
   f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui optimalisasi peranan Posyandu.
   g. Menanggulangi gizi buruk dan KKP (kekurangan kalori dan protein) melalui revitalisasi pelayanan keluarga berencana

(keluarga sehat), Posyandu, Puskesmas dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

III. URUSAN DESENTRALISASI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan semua urusan wajib yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Urusan wajib dan urusan pilihan dilaksanakan oleh 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, 7 Badan, 15 Dinas, 4 Kantor, 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 10 Kecamatan, dan 2 Lembaga Teknis Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembiayaan pelaksanaan urusan sebagian besar bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015.

Pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan transparan. Dana Perimbangan yang terserap sebanyak 99,28 % dari yang direncanakan. Alokasi belanja publik sebesar 78,52 % dari DAU dan alokasi belanja langsung sebesar 41,66 % dari APBD, meningkat dari tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Dana perimbangan yang terserap	790.120.264.901	866.349.309.561
2.	Dana perimbangan yang direncanakan	790.912.827.499	872.673.154.000
3.	Persentase dana perimbangan yang terserap	99,9	99,28
4.	Belanja langsung APBD	431.541.875.366	562.868.002.603
5.	Dana Alokasi Umum	628.208.911.000	716.888.890.000
6.	Persentase Belanja Publik terhadap DAU	68,69%	78,52%
7.	Belanja langsung	431.541.875.366	562.868.002.603
8.	Belanja APBD	1.115.268.464.937	1.351.218.021.265
9.	Belanja Langsung terhadap total APBD	38,69%	41,66%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Berdasarkan tabel diatas, dana perimbangan yang terserap mengalami kenaikan sebesar Rp.76.229.044.660,- , dari Rp.790.120.264.901,- di tahun 2014 menjadi Rp.866.349.309.561,- di tahun 2015. Dana perimbangan yang direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp.81.760.326.501,-, dari Rp.790.912.827.499,- di tahun 2014 menjadi Rp.872.673.154.000,- di tahun 2015. Persentase dana perimbangan yang terserap mengalami penurunan sebesar -0,62% , dari 99,90% di tahun 2014 menjadi 99,28% di tahun 2015.

Belanja langsung APBD mengalami kenaikan sebesar Rp.131.326.127.237,- , dari Rp.431.541.875.366,- di tahun 2014 menjadi Rp.562.868.002.603,- di tahun 2015. Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan sebesar Rp.88.679.979.000,- , dari Rp.628.208.911.000,- di tahun 2014 menjadi Rp.716.888.890.000,- di tahun 2015. Persentase Belanja Publik terhadap DAU mengalami kenaikan sebesar 9,83% , dari 68,69% di tahun 2014 menjadi 78,52% di tahun 2015.

Belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp.131.326.127.237,- , dari Rp.431.541.875.366,- di tahun 2014 menjadi Rp.562.868.002.603,- di tahun 2015. Belanja APBD mengalami kenaikan sebesar Rp.235.949.556.328,- , dari Rp.1.115.268.464.937,- di tahun 2014 menjadi Rp.1.351.218.021.265,- di tahun 2015. Belanja Langsung terhadap total APBD mengalami kenaikan sebesar 2,97% , dari 38,69% di tahun 2014 menjadi 41,66% di tahun 2015. Sehingga belanja langsung meningkat dari tahun ke tahun.

a. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

Pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman daerah dilakukan secara transparan. Besaran persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2015 tercatat persentase Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,91% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 12,91% sebagaimana tabel berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	169.084.092.757,66	171.142.372.423,24
2.	Total Pendapatan dalam APBD	1.142.564.074.394,14	1.325.455.417.995,12
3.	Persentase PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	14,80%	12,91%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

b. Efektivitas perencanaan, penyusutan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah

Perencanaan, penyusutan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan efektif. Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian, rasio SILPA pada tahun 2015 sebesar 4,93% lebih kecil dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 5,20% hal ini mengindikasikan adanya perimbangan yang cukup baik antara pendapatan dengan belanja. Dan rasio realisasi belanja mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 94,22% menjadi 93,81% pada tahun 2015 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah ditetapkan menunjukkan serapan cukup efektif, sebagaimana tabel berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA)	59.458.129.967,72	65.302.978.691,42
2.	Total Pendapatan dalam APBD	1.142.564.074.394,14	1.325.455.417.995,12
3.	**Rasio SILPA thdp total pendapatan**	**5,20%**	**4,93%**
4.	Realisasi Belanja	1.115.268.464.937,76	1.351.218.021.265,91
5.	Total Anggaran Belanja	1.183.706.491.611,69	1.440.316.574.065,63

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
6.	**Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja**	**94,22%**	**93,81%**

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

c. Pengelolaan potensi daerah

Pengelolaan potensi daerah dilaksanakan dengan sangat efektif ditandai dengan Realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.058.279.665,58% , dari Rp.169.084.092.757,66 di tahun 2014 menjadi Rp.171.142.372.423,24 di tahun 2015. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersangkutan. Sedangkan perkembangan penerimanaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	169.084.092.757,66	171.142.372.423,24
2.	Potensi Pendapatan Asli Daerah	121.539.840.910,36	171.760.398.912,82
3.	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	139,12%	99,64%
4.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dibanding tahun sebelumnya (%)	53,66%	1,22%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1.325.455.417.995,12 atau terjadi peningkatan sebesar Rp.182.811.333.367,98 (16 %) dari tahun 2014 yang sebesar Rp.1.142.644.084.627,14. Realisasi pendapatan daerah tersebut berasal dari: Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp.171.142.372.423,24, Pendapatan transfer sebesar Rp.1.118.977.831.337,48 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sebesar Rp. 35.335.214.234,40.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2014, sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	PERKEMBANGAN	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	**1.142.644.084.627,14**	**1.325.455.417.995,12**	**182.811.333.367,98**	**16,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**169.108.924.482,66**	**171.142.372.423,24**	**2.033.447.940,58**	**1,20**

NO	URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	PERKEMBANGAN	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.921.961.101,00	72.103.624.025,00	(3.818.337.076,00)	(5,03)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.485.936.000,70	20.655.957.659,86	(6.829.978.340,84)	(24,85)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.242.592.628,00	11.136.353.974,00	893.761.346,00	8,73
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.458.434.752,96	67.246.436.764,38	11.788.002.011,42	21,26
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**964.570.970.626,48**	**1.118.977.831.337,48**	**154.406.860.711,00**	**16,01**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**790.134.683.034,00**	**866.349.308.561,00**	**76.214.625.527,00**	**9,65**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	27.976.018.029,00	25.786.620.550,00	(2.189.397.479,00)	(7,83)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.126.771.005,00	3.370.428.011,00	(2.756.342.994,00)	(44,99)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	685.318.844.000,00	716.888.890.000,00	31.570.046.000,00	4,61
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	70.713.050.000,00	120.303.370.000,00	49.590.320.000,00	70,13
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**121.717.638.000,00**	**201.215.638.000,00**	**79.498.000.000,00**	**65,31**
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	121.717.638.000,00	201.215.638.000,00	79.498.000.000,00	65,31
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**52.718.649.592,48**	**51.412.884.776,48**	**(1.305.764.816,00)**	**(2,48)**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.718.649.592,48	51.412.884.776,48	(1.305.764.816,00)	(2,48)
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**8.964.189.518,00**	**35.335.214.234,40**	**26.371.024.716,40**	**294,1**
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.964.189.518,00	26.335.214.234,40	17.371.024.716,40	193,78
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00

Sumber : DPPKD Lombok Barat Tahun Anggaran 2015, belum audit BPK

e. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah tahun 2015 sebesar Rp. 1.115.268.464.937,76, mengalami peningkatan sebesar Rp. 236.004.459.428 atau 21,16 % dari tahun 2014 yang sebesar Rp. 1.115.213.561.837,76 dengan rincian Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 1.068.689.488.342,91 dan Belanja Modal sebesar Rp. 274.331.742.737,00 meningkat sebesar 35,21 % dari tahun sebelumnya.

Realisasi belanja APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015, sebagai berikut ;

No	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Perkembangan	
				(Rp)	%
1	2	4	3	5 = 3 - 4	5
2	**BELANJA**	**1.115.213.561.837,76**	**1.351.218.021.265,91**	**236.004.459.428**	**21,16**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**911.466.440.666,76**	**1.068.689.488.342,91**	**157.223.047.676**	**17,25**
2.1.1	Belanja Pegawai	648.276.688.630,00	682.765.764.165,16	34.489.075.535	5,32
2.1.2	Belanja Barang	168.509.030.008,00	185.621.924.458,00	17.112.894.450	10,16
2.1.5	Belanja Hibah	32.392.732.465,00	75.392.943.091,00	43.000.210.626	132,75
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.028.900.000,00	5.398.900.000,00	(4.630.000.000)	(46,17)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	52.259.089.563,76	119.509.956.628,75	67.250.867.065	128,69
2.2	**BELANJA MODAL**	202.897.307.528,00	274.331.742.737,00	71.434.435.209	35,21
2.2.1	Belanja Tanah	59.241.855.379,00	28.077.078.965,00	(31.164.776.414)	(52,61)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.326.251.096,00	61.112.863.203,00	24.786.612.107	68,23
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	66.430.473.788,00	94.666.939.409,00	28.236.465.621	42,51
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.797.269.900,00	89.544.490.360,00	53.747.220.460	150,14
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.101.457.365,00	930.370.800,00	(4.171.086.565)	(81,76)
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**57.000.000,00**	**999.143.000,00**	**942.143.000**	**1.652,8**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	57.000.000,00	999.143.000,00	942.143.000	1.652,8
2.4	**TRANSFER**	792.813.643,00	7.197.647.186,00	6.404.833.543	807,86
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/ DESA	792.813.643,00	7.197.647.186,00	6.404.833.543	807,86
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	792.813.643,00	7.197.647.186,00	6.404.833.543	807,86
	SURPLUS / (DEFISIT)	27.430.522.789,38	(25.762.603.270,79)	(53.193.126.060)	(193,92)

Sumber : DPPKD Lombok Barat Tahun Anggaran 2015, belum audit BPK.

f. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Surplus atau defisit anggaran merupakan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. Pada tahun anggaran 2015, penerimaan daerah keuangan Kabupaten Lombok Barat mengalami surplus sebesar Rp. 65.302.978.691,42, mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.688.725.391 (9,54), dari tahun 2014 yang mengalami defisit sebesar Rp. 59.614.253.300,72. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun anggaran 2015, pembiayaan Netto dalam angka positif sebesar Rp. 91.065.581.962,21 dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp.

32.183.730.511,34 sehingga berimbas pada besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2015 sebagaimana tabel 18 berikut ;

NO	URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	PERKEMBANGAN	
				(Rp)	%
1	2	4	3	5 = 4 - 3	5
3	**PEMBIAYAAN**				
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**	**56.269.739.110,03**	**110.088.454.112,72**	**53.818.715.003**	**95,64**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	55.518.459.167,03	59.614.253.300,72	4.095.794.134	7,38
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	49.974.012.000,00	49.974.012.000	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	751.279.943,00	500.188.812,00	(251.091.131)	(33,42)
3.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**24.086.008.598,69**	**19.022.872.150,51**	**(5.063.136.448)**	**(21,02)**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.600.000.000,00	16.000.000.000,00	(4.600.000.000)	(22,33)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.486.008.598,69	3.022.872.150,51	(463.136.448)	(13,29)
	PEMBIAYAAN NETTO	**32.183.730.511,34**	**91.065.581.962,21**	**58.881.851.451**	**182,96**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**59.614.253.300,72**	**65.302.978.691,42**	**5.688.725.391**	**9,54**

Sumber : DPPKD Lombok Barat Tahun Anggaran 2015, belum audit BPK.

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

1. URUSAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan urusan pendidikan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 542.971.604.021,- atau 37,70% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 490.433.869.083,- (90,32%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 10 program serta 63 kegiatan.

Tingkat pencapaian indikator kinerja kunci urusan pendidikan pada tahun 2014-2015 sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN	
		2014	2015
1	Jangkauan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	51,41%	72,32%
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	79,22%	82,02%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,91%	99,08%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,78%	77,32%
5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	65,32%	67,50%
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,16%	0,11%
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,40%	0,13%
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,16%	0,15%
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	96,10%	98,95%
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	87,56%	99,37%
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	90,02%	93,98%
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	116,95%	101,19%
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs	103,10%	96,16%
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	79,45%	72,86%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat

2 . URUSAN KESEHATAN

Penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.475.172.122,- atau 12,32% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 164.976.750.081,- (92,96%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 24 program serta 102 kegiatan.

2.1.DINAS KESEHATAN

Penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.365.455.484,- atau 7,45% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 100.473.828.804,- (93,58%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 20 program serta 85 kegiatan.

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95	94.49
2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80	9946
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90	94.63
4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90	93.27
5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	93.19
6	Cakupan kunjungan bayi	90	98.15
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100	100
8	Cakupan pelayanan anak balita	90	83.44
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	10.11
10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100
11	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	96.44
12	Cakupan peserta KB Aktif	70	75.02
13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit		
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2/100.000	0.524
	b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	87.29
	c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100	39.91
	d. Penderita DBD yang Ditangani	100	100
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	88.73
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100	3.76
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100	100
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	80	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat

Jumlah fasilitas penunjang urusan Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut ;

NO	Kecamatan	Sarana Kesehatan					Jumlah Sarana Kesehatan
		Jumlah RS	Jumlah Puskes mas	Jumlah Pustu	Jumlah Polikli nik	Jumlah Posyandu	
1	Gerung	1	2	10	1	93	107
2	Narmada	0	2	7	4	118	131
3	Gunungsari	0	2	8	3	103	116
4	Kediri	0	2	3	0	75	80
5	Kuripan	0	1	5	1	57	64
6	Labuapi	0	2	5	1	87	95
7	Batulayar	0	1	3	3	66	73
8	Lingsar	0	2	8	1	94	105
9	Lembar	0	1	5	0	83	89
10	Sekotong Tengah	0	2	5	1	92	100
Jumlah		**1**	**17**	**59**	**15**	**868**	**960**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat Tahun 2015

2.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PATUT PATUH PATJU

Penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.109.716.638,- atau 4,87% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 64.502.921.277,- (92,00%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 program serta 17 kegiatan.

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut;

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Bed Ocupancy Rate (B.O.R)	60% - 85%	71,32 %
2	Lengt of Stay (L.O.S)	7 hari	Sama dengan tahun 2014 yakni 5 hari
3	Turn Over Interval (T.O.I)	2 hari	Meningkat dari 1-2 hari
4	Bad Turn Over (B.T.O)	45 kali	65 kali
5	Gross Death Rate (G.D.R)	20/1000 pasien	29/1000 pasien
6	Net Death Reat (N.D.R)	15/1000 pasien keluar	14

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET (%)	REALISASI (%)
7	Akreditasi / Sertifikasi	Program Khusus	Program Khusus
8	Jumlah Spesialis	18	15
9	Jumlah Spesialis	18	12
10	Jumlah Unit Pelayanan yang dibangun	3	1

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.796.806.228,- atau 2,21% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 31.502.525.018,- (99,07%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 11 program serta 20 kegiatan.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN	
		2014	2015
1	Kebersihan Berdasarkan kriteria Adipura	37,93%	53,33%
2	Jumlah pasar tradisional tergolong baik	11	16
3	Jumlah seluruh pasar tradisional	29	30
4	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	13	7
5	Jumlah kasus lingkungan yang ada	13	7

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.683.126.003,- atau 9,42% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 134.172.925.718,- atau 98,89%. Program yang dilaksanakan sebanyak 14 program dan 42 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan pekerjaan umum pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	PANJANG JALAN (Km)	
		2014	2015
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	342,9	261,62
2.	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Km)	446,48	504,87
3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	76,80%	51,82%
4.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	11.894	11.894
5.	Luas irigasi kabupaten (Ha)	15.309	15.309
6.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	77,69%	77,69%
7.	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	124.247	136.286
8.	Jumla total rumah tangga	175.207	179.057
9.	Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%)	70,91%	76,91%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

5. URUSAN TATA RUANG

Penyelenggaraan urusan tata ruang pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.609.521.557,- atau 0,60% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.132.260.338,- (94,46%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 program serta 37 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan tata ruang tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	2014	2015
1.	Luas ruang terbuka hijau	9.568,10	9.568,10
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	51.231,70	51.231,70
3.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	18,68%	18,68%

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.413.934.882,- atau 0,65% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 9.001.645.633,- (95,62%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 11 program serta 63 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	**Perda No. 10 Tahun 2008** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025	**Perda No. 10 Tahun 2008** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	**Perda No. 5 Tahun 2009** Tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 - 2014**	**Perda No. 3 Tahun 2014** Tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019**
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Perbup No. 8B Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014	Perbup No. 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

Sumber : Bappeda kab. Lombok Barat

7. URUSAN PERUMAHAN

Penyelenggaraan urusan perumahan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.129.874.337,- atau 0,91% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.856.997.149,- (97,92%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 program serta 6 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan perumahan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Cakupan Rumah tangga pengguna air bersih	81,86%	80,64%
2.	Lingkungan pemukiman kumuh	0,02%	0,02%
3.	Rumah layak huni	85,34%	86,24%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.241.707.819,- atau 0,57% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.908.837.848,- (95,96%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 program serta 8 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan Urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	2014	2015
1.	Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2	**2**
2.	Rasio Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) terhadap jumlah penduduk	0,0027	0,0028
3.	Jumlah lapangan olahraga milik pemerintah	85	85
4.	Rasio Lapangan olahraga milik pemerintah terhadap jumlah penduduk	0,12	0,11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan urusan penanaman modal pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.492.796.609,- atau 0,24% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar

Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.438.179.425,- (98,44%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 6 program serta 20 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan penanaman modal pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	Realisasi PMDN	302.623.792.140	174.110.642.686,00
2	Kenaikan / penurunan Realisasi PMDN	-25,51	-42,47%
3	Persetujuan ijin investasi	108	86

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.586.481.330,- atau 0,32% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.474.397.520,- (97,56%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 program serta 46 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Persentase koperasi aktif	54,58%	56,88%
2.	Jumlah koperasi aktif	235	281
3.	Jumlah seluruh koperasi	480	494
4.	Persentase usaha mikro dan kecil	99,38%	100,00%
5.	Jumlah usaha mikro dan kecil	2.572	1.146
6.	Jumlah seluruh UKM	2.588	1.146

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Barat

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.085.749.674,- atau 0,42% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.887.273.018,- (96,74%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 program serta 26 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	316.868	351.922
2.	Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)	470.209	491.607
3.	Persentase Kepemilikan KTP	67,39%	71,58%
4.	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	376.074	393.170
5.	Jumah _penduduk Kabupaten Lombok Barat	708.527	708.881
6.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	53,08%	55,46%
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok Barat

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 504.851.000,- atau 0,04% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 496.315.400,- (98,31%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 program serta 9 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2015
1.	Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek Aktif	3.874
2.	Jumlah pekerja/buruh	10.088
3.	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	38,40%
4.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	6.410

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2015
5.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	6.730
6.	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	95,25%

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Daerah dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.444.018.217,- atau 1,07% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.164.937.164,- (98,19%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 7 program serta 56 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut;

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	KET
1	Regulasi ketahanan pangan	**Ada**	**Ada**	Perbup No.4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Lombok Barat
2	Ketersediaan pangan utama	**298,1 Kg/thn**	**297,77 Kg/thn**	Sumber : Dispertanakbun

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Daerah

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 576.956.000,- atau 0,04% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 519.417.000,- (90,03%). Adapun

program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 program serta 7 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	**2,68%**	**2,68%**
2.	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	**74,07%**	**82,00%**
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	**96,36%**	**96,15%**

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2015

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.198.881.984,- atau 0,71% dari jumlah belanja APBD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.714.696.182,- (95,25%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 9 program dan 34 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN	
		2014	2015
1.	Jumlah peserta program KB aktif	102.458	110.201
2.	Jumlah pasangan usia subur	145.501	146.904
3.	Prevalensi peserta KB aktif	70,42%	75,02%
4.	Jumlah PLKB/PKB	64	61
5.	Jumlah Desa/Kelurahan	122	122
6.	Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	52,46%	50,00%

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan urusan perhubungan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.670.160.747,- atau 0,67% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 9.497.671.060,- (98,22%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 9 program serta 47 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan perhubungan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Jumlah angkutan darat	356	427
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	1.681.805	1.556.659
3.	Rasio Angkutan darat	0,02%	0,03%

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 793.205.000,- atau 0,06% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 781.547.930,- (98,53%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 program serta 9 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Web site milik pemerintah daerah	31	31
2.	Pameran/expo yang diikuti	3	4

18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik , Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.366.079.946,- atau 1,69% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 23.675.343.991,- (97,17%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 23 program serta 94 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015
1	Kegiatan pembinaan politik daerah	**1 Keg**	**1 Keg**
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	**Tidak Ada**	**1 Keg**

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD,Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Dinas PPKAD, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Kabupaten , Kecamatan Gerung, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Labuap Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 303.113.151.349,- atau 21,04% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 290.210.873.748,-

(95,74%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 50 program serta 253 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Raperda yang diusulkan	14	17
2.	Raperda yang disetujui	8	11
3.	Persentase Raperda yang disetujui	57,14%	64,71%
4.	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	35
5.	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	25	35
6.	Persentase keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%
7.	Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun	582.544.500,04	20.804.852.374,00
8.	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan bersangkutan	391.064.401,54	11.647.296.350,00
9.	Persentase Penyelesaian temuan	67,13%	55,98%

20. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.498.165.523,- atau 0,45% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.234.118.232,- (95,94%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 program serta 19 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Jumlah PKK aktif	122	122
2.	Jumlah PKK	122	122
3.	Persentase PKK aktif	100%	100%
4.	Jumlah Posyandu Aktif	794	675

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
5.	Total Posyandu	850	868
6.	Persentase Posyandu Aktif	93,41%	77,76%

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

21. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan urusan Sosial pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.962.043.291,- atau 0,55% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.689.946.762,- atau 96,58% Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 6 program serta 16 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan sosial pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	32	24
2.	Jumlah PMKS yg tertangani	279	307
3.	Jumlah PMKS yg ada	1.980	701
4.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	14,09%	43,79%
5.	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	1.631	4.863
6.	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	2.039	229.551
7.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	79,99%	2,12%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

22. URUSAN BUDAYA

Penyelenggaraan urusan budaya pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Seni dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.887.567,- atau 0,07% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 913.045.638,- (96,02%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 program serta 6 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan budaya pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3 kali	3 kali
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	10	18
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2 situs	2 situs

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun benda, situs dan kawasan cagar budaya yang berada di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana berikut ;

No	Nama / Jenis Benda	Jumlah	Lokasi Kecamatan
1	Makam Keramat Batu Layar	1	Batulayar
2	Pure Batu Bolong	1	Batulayar
3	Pure Umum Gunung Baliku	1	Gunungsari
4	Pure Gunung Agung	1	Gunungsari
5	Pure Majapahit	1	Gunungsari
6	Makam Lalu Gede Batu Riti	1	Gunungsari
7	Gong Kedatuan Mambalan	1	Gunungsari
8	Timba Siluman	1	Gunungsari
9	Pesanggrahan Bukit Pendem	1	Gunungsari
10	Takepan Lontar	1	Kuripan
11	Pedewak Pelabu	1	Kuripan
12	Makam Inder Gecek	1	Kuripan
13	Makam Payung	1	Kuripan
14	Batu Kelambu	1	Kuripan
15	Batu Tulis	1	Kuripan
16	Kayangan / Betare	1	Kuripan
17	Batu Gendang	1	Kuripan
18	Goa Raksase	1	Kuripan
19	Kubur Cine	1	Kuripan
20	Kamar Batu	1	Kuripan
21	Batu Kemeras	1	Kuripan
22	Batu Ngangak	1	Kuripan
23	Batu Kenculit	1	Kuripan
24	Batu Lanse	1	Kuripan
25	Senjate Pusake (tombak)	1	Kuripan
26	Makam Datu Kuripan	1	Kuripan
27	Makam Patih Seketeng	1	Kuripan

No	Nama / Jenis Benda	Jumlah	Lokasi Kecamatan
28	Makam TGH.Saleh Hambali	1	Labuapi
29	Makam Demung	1	Labuapi
30	Makam Milam (Padang Reak)	1	Labuapi
31	Makam TGH. Muhibudin	1	Labuapi
32	Pure Gunung Pengsong	1	Labuapi
33	Makam Keramat	1	Lembar
34	Rumah Adat	1	Lingsar
35	Langgar	1	Lingsar
36	Pura Lingsar	1	Lingsar
37	Kemaliq Lingsar	1	Lingsar
38	Pure Ulon	1	Lingsar
39	Pure Sarasute	1	Lingsar
40	Pure Sarasuake	1	Lingsar
41	Pancuran Lengkoq Srung	1	Lingsar
42	Kuburan Cerepak Telu	1	Lingsar
43	Taman Narmada	1	Narmada
44	Pure Suranadi	1	Narmada
45	Makam Prabu Nursiwan	1	Narmada
46	Meriam Jepang	1	Sekotong Tengah
47	Makam Kedaro	1	Sekotong Tengah
48	Makam Mudung	1	Sekotong Tengah
49	Makam Segerining	1	Sekotong Tengah
50	Makam Munareng	1	Sekotong Tengah
51	Gili Layar	2	Sekotong Tengah
Jumlah		**52**	

23. URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan urusan statistik pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 619.570.000,- atau 0,04% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 616.216.700,- (99,46%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 program serta 8 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan statistik pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	KETERANGAN
1	Buku ”kabupaten dalam angka”	**ada**	**ada**	Diterbitkannya buku “Lombok Barat Dalam Angka tahun 2014 dan 2015”
2	Buku ”PDRB kabupaten”	**ada**	**ada**	Diterbitkannya buku “PDRB Kabupaten Lombok Barat”

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

24. URUSAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan urusan kearsipan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.854.702.734,- atau 0,20% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.678.792.373,- (93,84%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 program serta 32 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan kearsipan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	**6**	**6**
2.	Jumlah SKPD	**42**	**42**
3.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	**14,29%**	**14,29%**
4.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	**5**	**5**

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

25. URUSAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan urusan perpustakaan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 433.091.000,- atau 0,03% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.

1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 428.377.100,- (98,91%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 program serta 3 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan perpustakaan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	**14.343**	**14.329**
2.	Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	**34.504**	**40.806**
3.	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	**41,57%**	**35,11%**
4.	Pengunjung perpustakaan	**2.445**	**2.199**
5.	Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	**39.045**	**40.362**
6.	Persentase pengunjung perpustakaan	**6,26%**	**5,45%**

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

26. URUSAN PERTANAHAN

Penyelenggaraan urusan pertanahan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Kantor Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.342.120.425,- atau 2,18% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 28.406.339.275,- (90,63%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 program serta 6 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan pertanahan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Prosentase Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Lombok Barat	20,01%	32,28%
2.	Jumlah gugatan kasus yang terdaftar di Pengadilan	15	7
3.	Jumlah kasus yang diselesaikan	24	3
4.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	63%	42,86%

Sumber : Kantor Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat

B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.628.102.925,8,- atau 0,67% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 9.385.762.565,- (97,48%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 14 program serta 50 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Produksi perikanan	99,24%	101,02%
2.	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	44.478	40.936,07
3.	Target Daerah (Ton)	45.204	40.523,53
4.	Persentase Konsumsi ikan	100,15%	100,15%
5.	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	32,35	33,85
6.	Target Daerah (Kg)	32,3	33,8

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

2. URUSAN PERTANIAN

Penyelenggaraan urusan pertanian pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Bidang Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.075.638.343,- atau 2,92% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 41.464.625.603,- (98,55%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 17 program serta 92 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan pertanian pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	**5,11**	**5,03**
2.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton)	**211.175**	**211.082**
3.	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)	**41.365**	**41.996**
4.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2014**)	**25,33%**	**20,37%**

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan

3. URUSAN KEHUTANAN

Penyelenggaraan urusan kehutanan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Bidang Penyuluhan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.454.109.540,- atau 0,52% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.066,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.239.959.953,- (97,13%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 6 program serta 20 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan kehutanan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	8,96	0,27
2.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha)	1.620,85	45,93
3.	Luas total hutan dan lahan kritis (ha)	18.088,66	17.202,05
4	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	25,16	25,11
5.	Luas Kerusakan Kawasan Hutan (ha)	10.561,56	10.542,28
6.	Luas Kawasan Hutan (ha)	41.981,90	41.981,90

Sumber : Dinas Kehutanan

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.532.690.000,- atau 0,59% dari total anggaran

pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.320.093.088,- (97,51%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 program serta 31 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan	39.960,10	18,8
2.	luas area penambangan yang liar	40.019,05	50
3.	Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan	99,85%	37,60%
4.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2014**)	3,96%	7,07%

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi

5. URUSAN PARIWISATA

Penyelenggaraan urusan pariwisata pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.507.644.786,- atau 0,38% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.299.234.301,- (96,22%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 6 program serta 30 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan pariwisata pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Kunjungan wisata	465.370	468.149
2.	Kunjungan wisatawan nusantara	201.248	**248.319**
3.	Kunjungan wisatawan asing	264.122	**219.830**
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2014**) atas harga dasar berlaku	**8,46%**	**8,49%**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

6. URUSAN INDUSTRI

Penyelenggaraan urusan industri pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.157.370.000,- atau 0,08% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.131.255.543,- (97,74%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 program serta 4 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan industri pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2014**)	**3,34%**	**4,50%**
2.	Pertumbuhan Industri	**0,82%**	**4,63%**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

7. URUSAN PERDAGANGAN

Penyelenggaraan urusan perdagangan pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.986.999.306,- atau 0,62% dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.435.228.247,- (93,86%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 7 program serta 38 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan perdagangan pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2014**)	14,96%	12,84%
2.	Nilai ekspor (US$)	803.672,40	288.280
3.	Nilai Import (US$)	237.236,81	269.625
4.	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)	566.435,59	18.655

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lombok Barat

8. URUSAN TRANSMIGRASI

Penyelenggaraan urusan transmigrasi pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.623.800,- atau % dari total anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.440.316.574.065,63,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 75.511.300,-(85,20%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 program serta 4 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan transmigrasi pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Jumlah transmigran swakarsa	0	0
2.	Jumlah transmigran mandiri	4 KK	10 KK

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Barat

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah sehingga penataan wilayah menjadi terarah dan lebih baik. Pada program nasional perekaman data penduduk E-KTP, sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 351.992 orang telah melakukan perekaman dari total wajib KTP sebanyak 491.607 orang atau 71,60 %. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah tentang kebersihan yaitu Peraturan

Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta rasio personil Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 16,22 % dari jumlah penduduk. Aksi demo protes pada Tahun 2015 tidak ada, hal ini menunjukkan adanya keselarasan dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka membangun Kabupaten Lombok Barat. Namun masih perlu ditingkatkan, karena belum adanya Peraturan Daerah tentang PSK dan PKL untuk lebih teratur tertatanya suatu daerah.

b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah berjalan dengan efektif dan selaras. Hal ini dapat dilihat dari Pengiriman Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tepat waktu, telah dilaksanakannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 17 urusan melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah Kerjasama Daerah dengan daerah lain yang masih berlaku sebanyak 17 buah.

c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintahan Daerah berjalan selaras dengan kebijakan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian prioritas pembangunan daerah, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar 72,73 % dari yang ditetapkan, tepatnya penetapan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tanggal 18 Desember 2014, adanya Peraturan

Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pelayanan dasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari 61,99% di tahun 2014 menjadi 63,02% di tahun 2015. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar 48,51% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Adanya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, rasio PNS sebesar 1,15 % dari jumlah penduduk, dan sesuainya struktur SKPD berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 dan PP 41 Tahun 2007.

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memiliki sistem informasi kepegawaian sehingga memperlancar tugas-tugas kepegawaian.

d. Efektivitas hubungan pemerintah daerah dan DPRD

Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD ditandai dengan disetujui dan ditetapkannya 11 perda dari 17 raperda yang diajukan, meningkat dari tahun sebelumnya dengan jumlah perda yang ditetapkan sebanyak 8 perda .

e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Proses pengambilan keputusan oleh DPRD dilakukan dengan musyawarah, dan seluruh keputusan DPRD yang berjumlah 35 keputusan ditinjaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, atau meningkat sebanyak 10 keputusan dari tahun lalu sebanyak 25 keputusan.

f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah berjalan efektif ditandai dengan Seluruh Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Keputusan dan Peraturan.

g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan

Ketaatan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan ditandai dengan tidak adanya perda yang dibatalkan oleh Pemerintah pusat dari 15 buah Peraturan Daerah yang dievaluasi.

h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah

Proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah berjalan intensif dan efektif. Hal ini dapat dilihat adanya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang memuat pelayanan informasi publik, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan saran, masukan, konsultasi hukum melalui media website resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, SMS Interaktif, dan Media Koran.

i. Terobosan / inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dan dikeluarkannya ijin investasi sebanyak 86 ijin terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi sebesar U$ 174.110.642.686 dan Penanaman Modal Asing sebanyak 118 ijin dengan nilai investasi sebesar U$ 342.316.147,26. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah melaunching pengadaan E-Procurement yang dimulai sejak November 2011 sehingga transparansi terhadap pengadaan barang dan jasa dapat lebih meningkat.

Terobosan yang lainnya adalah dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan, sarana ekonomi masyarakat yang berdapak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam bidang penataan administrasi kependudukan dengan meluncurkan mobil

layanan KTP, KK keliling, yang bertujuan untuk menjangkau penduduk yang sulit mengakses kantor layanan kependudukan.

Terobosan terakhir adalah dalam bidang penyelamatan kerusakan hutan melalui program penghijauan melalui program pohon pengantin yang dimaksudkan setiap pasangan rumah tangga baru wajib melakukan penghijauan.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerima pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dari 7 (tujuh) Kementerian yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementarian Pariwisata dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama ini dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat.

Terdapat 10 (sepuluh) satuan kerja (satker) yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah penerima Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Lombok Barat. Dari 10 (sepuluh) program tersebut, 9 (sembilan) diantaranya adalah Tugas Pembantuan dan 1 (satu) Urusan Bersama.

Tugas Pembantuan di Kabupaten Lombok Barat di laksanakan oleh :

1. Dinas Pertanian melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian melalui Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
2. Dinas Kesehatan melaksanakan TP dari Kementerian Kesehatan melalui Program :

a. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
b. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
c. Pembinaan Upaya Kesehatan

3. Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan TP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Program :
   a. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
   b. Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan TP dari Kementerian Dalam Negeri melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan (Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan / SiAK)
5. Dinas Pariwisata melaksanakan TP dari Kementerian Pariwisata melalui program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanaan TP dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Program Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Bursa Kerja.

Sedangkan Urusan Bersama yang dilaksanakan Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) melaksanakan Urusan Bersama dari Kementerian Dalam Negeri melalui Program Bina Pemerintahan Desa.

Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diterima Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.45.408.836.000,- dengan perincian total pagu Tugas Pembantuan sebesar Rp.36.453.592.000,- dan total pagu Urusan Bersama sebesar Rp.8.955.244.000,-.

Tabel berikut adalah rekapitulasi dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diterima Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015.

NO	SKPD/SATKER	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pertanian Kab.Lombok Barat		15.228.200.000,00	
		Program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil produksi tanaman pangan	15.228.200.000,00	10 Kecamatan

NO	SKPD/SATKER	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5
2.	Dinas Kesehatan Kab.Lombok Barat		8.460.570.000,00	
		Program Pengendalian Penyakit & penyehatan Lingkungan	1.270.088.000,00	
		Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu & Anak	3.090.482.000,00	
		Progra Pembinaan Upaya Kesehatan	4.100.000.000,00	
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Barat		8.678.856.000,00	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	7.600.000.000,00	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.078.856.000,00	
4.	Dinas Pariwisata		1.500.000.000,00	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.500.000.000,00	
5.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		1.555.942.000,00	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan & Pencacatan Sipil	1.555.942.000,00	
6.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.030.024.000,00	
		Program Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Bursa Kerja	1.030.024.000,00	
7.	BPMPD		8.955.244.000,00	
		Program Bina Pemerintahan Desa	8.955.244.000,00	
TOTAL			45.408.836.000,00	

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Barat

F. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

a. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi lain tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana berikut ini ;

1. Nama Kerjasama : Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Barat
   No. Kerjasama : 00814.A/05-Bappeda/2015
   Nomor : 52011.006
   Bidang Kerjasama : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   Mitra Kerjasama : BPS Kabupaten Lombok Barat
   Hasil Kerjasama : Buku IPM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

2.	Nama Kerjasama	:	Penyusunan dan pengumpulan Data PDRB
	No. Kerjasama	:	008/14.A/05-Bappeda/2015 Nomor : 52011.006
	Bidang Kerjasama	:	Teranalisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
	Mitra Kerjasama	:	BPS Kabupaten Lombok Barat
	Hasil Kerjasama	:	Dokumen PDRB Kabupaten Lombok Barat Menurut Kecamatan
3.	Nama Kerjasama	:	Penyusunan Distribusi Pendapatan
	No. Kerjasama	:	008/14.A/05-Bappeda/2015 Nomor : 52011.006
	Bidang Kerjasama	:	Teranalisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
	Mitra Kerjasama	:	BPS Kabupaten Lombok Barat
	Hasil Kerjasama	:	Dokumen Distribusi Pendapatan
4.	Nama Kerjasama	:	Penyusunan Nilai Tukar Petani
	No. Kerjasama	:	008/14.A/05-Bappeda/2015 Nomor : 52011.006
	Bidang Kerjasama	:	Teranalisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
	Mitra Kerjasama	:	BPS Kabupaten Lombok Barat
	Hasil Kerjasama	:	Dokumen Nilai Tukar Petani
5.	Nama Kerjasama	:	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Menurut Penggunaan
	No. Kerjasama	:	008/14.A/05-Bappeda/2015 Nomor : 52011.006
	Bidang Kerjasama	:	Teranalisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
	Mitra Kerjasama	:	BPS Kabupaten Lombok Barat
	Hasil Kerjasama	:	Dokumen PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Lombok Barat

b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Kerjasama daerah Kabupaten Lombok Barat dengan pihak ketiga pada tahun 2015 antara lain sebagai berikut ;

1.	Nama Kerjasama	:	Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tanda Masuk di Pelabuhan Senggigi
	No. Kerjasama	:	-
	Bidang Kerjasama	:	Perhubungan Laut
	Mitra Kerjasama	:	Pemerintah Desa Senggigi

	Hasil Kerjasama	:	1. Hasil pengelolaan disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Terpeliharanya fasilitas pelabuhan
2.	Nama Kerjasama	:	Pelaksanaan Pengelolaan/pengeoprasian Kapal KM. Gili Sudak dan KM. Gili Layar (KPDT 2009)
	No. Kerjasama	:	JUKLAK/JUKNIS Penggunaan Dana DAK KPDT Tahun 2009
	Bidang Kerjasama	:	Perhubungan Laut
	Mitra Kerjasama	:	Kelompok Angkutan Penyeberangan Laut, Dusun Tawun – Sekotong
	Hasil Kerjasama	:	1. Hasil pengelolaan disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Mempermudah akses masyarakat ke gili-gili
3.	Nama Kerjasama	:	Pelaksanaan pengelolaan 9 unit Kendaraan Angkutan Perintis Perdesaan (KPDT 2012)
	No. Kerjasama	:	JUKLAK/JUKNIS Penggunaan Dana DAK KPDT Tahun 2012
	Bidang Kerjasama	:	Perhubungan Darat
	Mitra Kerjasama	:	1. SMPN 4 NARMADA 2. SMPN 2 KEDIRI 3. SMPN 3 LABUAPI 4. DINIYAH AL-MAJDIYAH ASSAFIIYAH 5. MA.DARUNNAJAH 6. WAJEDI 7. SMPN 4 GUNUNG SARI 8. YAYASAN PONPES NURUL MUJAHIDIN 9. MTS. BAGIK POLAK
	Hasil Kerjasama	:	1. Hasil pengelolaan disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Tersedianya sarana angkutan yang menunjang aksesbilitas masyarakat
4.	Nama Kerjasama	:	Pelaksanaan pengelolaan 4 unit Kendaraan Truck Serbaguna (KPDT 2013)
	No. Kerjasama	:	JUKLAK/JUKNIS Penggunaan Dana DAK KPDT Tahun 2012
	Bidang Kerjasama	:	Perhubungan Darat
	Mitra Kerjasama	:	1. KLP.TANI OTAKDE 2. KLP. BUNGA MELATI 3. KLP. LAWANG KUTE MAJU 4. KLP. TANI PATUH ANGEN
	Hasil Kerjasama	:	1. Hasil pengelolaan disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Tersedianya sarana angkutan yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat

5.	Nama Kerjasama	:	Pelaksanaan pengelolaan 27 Unit Kendaraan Serbaguna Roda Tiga (KPDT 2013)
	No. Kerjasama	:	JUKLAK/JUKNIS Pengelolaan Kendraan Serbaguna Roda Tiga
	Bidang Kerjasama	:	Perhubungan Darat
	Mitra Kerjasama	:	1. KLP. NELAYAN BERIUK BERJUANG 2. KLP. SALING TULONG 3. KUBe TEMPOS BERSATU 4. KUBe.PONPES AL-AZHAR 5. GAPOKTAN SEJAHTERA MANDIRI 6. KUBe.DESA BAGIK POLAK 7. KUBe. DESA KURIPAN TIMUR 8. KLP. TANI SUBUR BERSEMI 9. KLP. TANI MAU BERSAMA 10. KLP. BANGKIT BERSAMA 11. ALMANAR BERSATU 12. KUBe. MINASA BAHARI 13. KUBe. ALKHUMAIRA 14. KUBe BERKAH BERSAMA 15. KLP. TANI LADUNGAN 16. KUBe PASAR SENI 17. KUBe DESA BAGIK POLAK BARAT 18. KLP. MAJU BERMARTABAT 19. KUBe DESA KERU 20. KLP.TANI EMBUNG KARYA SEJATI 21. KUBe KWN PADE ANGEN 22. KLP. PISANG SEHAT 23. KUBe BINA KARYA 24. KUBe SUKMA MAJU 25. KLP. USAHA TELUR 26. KUBe. BADREAN 27. KLP. PAMAN SAM
	Hasil Kerjasama	:	Tersedianya sarana angkutan yang menunjang aksesbilitas masyarakat

c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Lombok Barat antara lain:

a. Kerjasama dengan Polres Lombok Barat, dalam menangani kamtibmas.
b. Kerjasama dengan Kodim 1606 Lombok Barat, dalam penanganan keamanan dan penanggulangan bencana alam.
c. Kerjasama dengan Kejaksaan, dalam hal pengamatan aliran-aliran kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat.
d. Kerjasama dengan Badan SAR Nusa Tenggara barat, dalam penanganan penanggulangan bencana alam.

d. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah sudah dilaksanakan Kabupaten Lombok Barat berbatasan dengan 3 (tiga) segmen, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Dalam penyelesaian batas daerah dengan ketiga segmen tersebut telah mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun sebelumnya, antara lain ;

a. Untuk penyelesaian batas antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi terdapat perbedaan konsideran pada pasal 2 ayat ke 4 dengan lampiran pada peta, sehingga perlu penjelasan lebih khusus terhadap permasalahan tersebut sebelum disosialisasikan kepada masyarakat.
b. Penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara telah mengalami titik temu, yaitu dengan telah ditandatanganinya berita acara kesepakatan antar kepala daerah mengenai penarikan garis batas di wilayah Pusuk. Saat ini penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara sedang dalam proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
c. Penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah masih belum mengalami titik temu, namun kedua Pemerintah Kabupaten sepakat untuk menyerahkan permasalahan batas kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai solusi terbaik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

1. Melalui Program Penataan daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota untuk penyelesaiannya.

2. Terhadap permasalahan perbedaan konsideran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memfasilitasi kedua pemerintahan kabupaten/kota untuk merapatkan pal batas yang menjadi potensi sengketa batas.
3. Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan segmen Kabupaten Lombok Utara hanya mendorong agar Kementerian Dalam Negeri cepat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara.
4. Untuk batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah kedua Pemerintah Kabupaten sepakat untuk menyerahkan permasalahan batas kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Dalam Negeri.

V. PENUTUP

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 merupakan laporan hasil kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015 atau merupakan pelaksanaan capaian kinerja tahun ke 2 dari RPJMD 2014-2019. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 merupakan informasi laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (progress report) dan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan 5 tahunan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan

kekurangan yang harus kita sikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif, inovatif dan solutif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan**.**

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan bathin kepada kita semua untuk terus membangun Kabupaten Lombok Barat yang kita cintai ini semakin Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai Patut, Patuh, Patju.

Terima Kasih,

Gerung, 1 April 2015

BUPATI LOMBOK BARAT

ttd

H. FAUZAN KHALID